

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode 30 Juni Tahun 2023

Jl. Pancasila No. 12 Gunungsitoli

Gunungsitoli - Sumatera Utara 22814
Jl. Pancasila No. 12 Gunungsitoli
Telp. 0639 21343 Fax. 0639 21343
Gunungsitoli - Sumatera Utara
e-mail : info@pn-gunungsitoli.go.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Untuk Periode 30 Juni 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pancasila No. 12 Gunungsitoli

Telp. 0639 21343 Fax. 0639 21343

Gunungsitoli - Sumatera Utara 22814

e-mail : info@pn-gunungsitoli.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Gunungsitoli, 30 Juni 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI,

ERWIN HAREFA, S.H.
NIP. 19721221 199303 1 002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	13
II. Neraca.....	15
III. Laporan Operasional.....	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum	23
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	37
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	44
F. Pengungkapan Penting Lainnya	53
Daftar dan Lampiran	55
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	56
Daftar Hibah Langsung.....	59

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Jl. Pancasila No. 12 Gunungsitoli Gunungsitoli - Sumatera Utara 22814

Telp. 0639 21343 Fax. 0639 21343 e-mail : info@pn-gunungsitoli.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gunungsitoli, 30 Juni 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI,

ERWIN HAREFA, S.H.
NIP. 19721221 199303 1 002

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai pada Bulan Juni TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 2.307.310 atau mencapai 77 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 3.010.000.

Realisasi Belanja Negara sampai pada Bulan Juni TA 2023 adalah sebesar Rp 2.755.224.163 atau mencapai 51 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 5.491.491.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2023. Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 51.689.828.806, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 30.847.885; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 51.658.980.921; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 282.638.454 dan Rp 51.407.190.352.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 2.520.195, sedangkan jumlah

beban adalah sebesar Rp. 3.026.365.753, sehingga terdapat surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp (3.023.845.558). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 0 dan surplus/(defisit) sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp (3.023.845.558).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 51.623.381.557 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (3.023.845.558) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0, dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 2.807.654.353, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp 51.407.190.352.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2023			TA 2022
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	3.010.000	2.307.310	77	2.383.099
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		3.010.000	2.307.310	77	2.383.099
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	3.658.016.000	1.940.897.528	53	1.557.069.957
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.831.975.000	833.126.635	45	962.525.657
3.	Belanja Modal	B.2.3.	1.500.000	0	0	0
	Jumlah Belanja Negara		5.491.491.000	2.775.224.163	51	2.482.051.300

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
NERACA
PER 30 JUNI 2023 DAN 31 JUNI 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2023	30 Juni 2022
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C. 1.	635.000	1.045.000
Jumlah Aset Lancar		635.000	1.045.000
Aset Tetap			
Tanah	C. 2.	42.744.912.000	42.744.912.000
Peralatan dan Mesin	C. 3.	2.996.632.843	2.955.732.843
Gedung dan Bangunan	C. 4.	9.962.266.000	9.962.266.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 5.	126.591.000	126.591.000
Aset Tetap Lainnya	C. 6.	3.380.440	3.380.440
Konstruksi dalam Pengerjaan	C. 7.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 8.	(4.174.801.362)	(4.169.838.862)
Jumlah Aset Tetap		51.658.980.921	51.623.043.421
Aset tak Berwujud	C. 9.	4.950.000	4.950.000
Aset Lain-Lain	C. 10.	12.500.000	12.500.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C. 11.	(17.450.000)	(17.450.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		51.689.828.806	51.624.088.421
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak ketiga	C. 12.	252.638.454	706.864
Uang Muka DARI kppn	13.	30.000.000	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		282.638.454	706.864

Jumlah Kewajiban		0	6.847.719
EKUITAS			
Ekuitas	C. 14.	51.407.190.352	51.623.381.557
Jumlah Ekuitas Dana		51.407.190.352	51.623.381.557
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		51.689.828.806	51.624.088.421

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2023	2022
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2.520.195	1.685.770
Jumlah Pendapatan		2.520.195	1.685.770
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	2.167.133.372	2.035.765.711
Beban Persediaan	D. 3	22.234.500	24.303.500
Beban Barang dan Jasa	D. 4	395.815.835	416.542.173
Beban Pemeliharaan	D. 5	357.575.996	353.490.940
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	83.606.050	149.053.511
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	238.822.608
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10		
Jumlah Beban		3.026.365.753	3.217.978.443
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(3.023.845.558)	(3.216.292.673)
Kegiatan Non Operasional			
	D. 11		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Selisih Kurs			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	9.440.214
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(3.023.845.558)	(3.215.352.459)

Pos Luar Biasa	D. 12	0	0
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(3.023.845.558)	(3.215.352.459)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2023	2022
Ekuitas Awal	E. 1	51.623.381.557	52.807.928.031
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(3.023.845.558)	(3.215.352.459)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	0	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E. 3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	0
Jumlah		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	2.807.654.353	2.479.668.201
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(216.191.205)	(735.684.258)
Ekuitas Akhir		51.407.190.352	51.072.243.773

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Visi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung.

Misi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli adalah

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
5. Menciptakan aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme secara handal dan professional di bidang tugasnya masing-masing

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Gunung Sitoli melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Ketenagaan mencakup:
 - a) Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi

- b) Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
 - c) Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
 - d) Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi
2. Sarana mencakup :
- a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata
 - b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.
 - c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
3. Ketatalaksanaan mencakup :
- a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.
 - b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.
4. Hukum materil mencakup :
- a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
 - b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Juni, unaudited, dan audit

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, Informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu,

dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sitoli adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja

yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja antara lain:

No.	Uraian	Pagu Awal	Pagu Setelah Revisi
1.	Belanja Pegawai	3.658.016.000	3.658.016.000
2.	Belanja Barang	1.831.975.000	1.831.975.000
3.	Belanja Modal	1.500.000	1.500.000
Total Belanja		5.491.491.000	5.491.491.000

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2023 mengalami Kenaikan Nilai sebesar 0 atau 0 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena adanya Penambahan jumlah hakim sehingga Sewa Rumah Dinas Bertambah

Perbandingan realisasi PNBP TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2023 dan 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.307.310	2.383.099	(75.789)	(3)
2.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0,00
Total Pendapatan		2.307.310	2.383.099	(75.789)	(3)

B.1. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp 2.775.224.163

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Gunung Sitoli per 30 Juni TA 2023 adalah sebesar Rp. 2.775.224.163 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 51% dari anggaran

senilai Rp. 5.491.491.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.658.016.000	1.940.897.528	53
Belanja Barang	1.831.975.000	833.126.635	45
Belanja Modal	1.500.000	1.200.000	88
Total Belanja Bruto	5.491.491.000	2.775.224.163	51
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	5.491.491.000	2.775.224.163	51

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 293.172.863 atau sebesar 12 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena :

1. Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2023 ada Pengurangan jumlah hakim sehingga belanja pegawai mengalami Penurunan;
2. Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2023 ada penambahan belanja sewa berupa bantuan sewa rumah dinas hakim.

Perbandingan realisasi belanja TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	1.940.897.528	1.557.069.957	(383.827.571)	(20%)
Belanja Barang	833.126.635	924.981.343	91.854.708	11%
Belanja Modal	0	0	0	0%
Total Belanja	2.774.024.163	2.482.051.300	(291.972.863)	(9%)

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
1.940.897.528*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Gunung Sitoli per 30 Juni 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp 1.940.897.528 dan Rp. 1.557.069.957.

Realisasi Belanja Pegawai Juni TA 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp. (383.827.571)

atau sebesar (20%) persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai Juni TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2023 ada Pengurangan jumlah hakim sehingga belanja pegawai mengalami Penurunan
2. Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2023 ada Penambahan jumlah hakim dan kurangnya rumah dinas sehingga ada penambahan belanja sewa berupa bantuan sewa rumah dinas hakim.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	773.273.240	631.593.020	141.680.220	22%
Beban Pembulatan Gaji PNS	14.313	11.412	2.901	25%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	48.863.640	46.925.180	1.938.460	4%
Beban Tunj. Anak PNS	18.683.828	16.130.150	2.553.678	16%
Beban Tunj. Struktural PNS	16.480.000	14.420.000	2.060.000	14%
Beban Tunj. Fungsional PNS	772.080.000	588.620.000	183.460.000	31%
Beban Tunj. PPh PNS	108.189.412	75.168.999	33.020.413	44%
Beban Tunj. Beras PNS	45.552.180	40.048.260	5.503.920	14%
Beban Uang Makan PNS	94.561.000	88.403.000	6.158.000	7%
Beban Tunjangan Umum PNS	11.900.000	10.040.000	1.860.000	19%
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	51.300.000	45.900.000	5.400.000	12%
Total Belanja Brutto	1.940.897.613	1.557.260.021	383.637.592	25%
Pengembalian Belanja	85	190.064	-189.979	
Total Belanja Netto	1.940.897.528	1.557.069.957	383.827.571	25%

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp
833.126.635*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Gunung Sitoli per 30 Juni 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp. 833.126.635 dan Rp 924.981.343.

Realisasi Belanja Barang Juni TA 2023 mengalami penurunan sebesar 91.854.708 atau

sebesar 11 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang Juni TA 2022.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	368.661.640	354.280.921	14.380.719	4%
Belanja Barang Persediaan	21.824.500	24.897.000	-3.072.500	-12%
Belanja Jasa	946.024	43.108.971	-42.162.947	-98%
Belanja Pemeliharaan	357.575.996	353.490.940	4.085.056	1%
Belanja Perjalanan Dinas	83.606.050	149.053.511	-65.447.461	-44%
Belanja Barang Non Operasional	512.425	150.000	362.425	242%
Total Belanja Brutto	833.126.635	924.981.343	-91.854.708	-11%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0%
Total Belanja Netto	833.126.635	924.981.343	225.085.601	27%

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal
:Rp 1.200.000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Gunung Sitoli per 30 Juni 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp 1.200.000 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami perubahan dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain: Pada Tahun 2023 Belanja Modal telah dilaksanakan.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	1.200.000	0	1.200.000	100
Total Belanja Brutto	1.200.000	0	1.200.000	100
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	1.200.000	0	1.200.000	100

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp.1.045.000

Aset Lancar

C.1. Persediaan

*Persediaan:
Rp 22.234.500*

Persediaan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 22.234.500 dan Rp. 24.303.500. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni TA 2023 dan 30 Juni 2022

No.	Uraian	30 Juni 2023	30 Juni 2022
1	Barang Konsumsi	22.234.500	24.303.500
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		22.234.500	24.303.500

*Aset Tetap:
Rp.
51.890.540.492*

Aset Tetap

C.2.Tanah

*Tanah:
Rp
42.744.912.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 42.744.912.000 dan Rp. 42.744.912.000.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2022	42.744.912.000
Mutasi Tambah	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 30 Juni 2023	42.744.912.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	0
Nilai Buku 30 Juni 2022	42.744.912.000

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	Luas (m ²)	Lokasi	Nilai
1.	1.008	Pulau - Pulau Batu Tello	251.250.000
2.	794	Jl. IR. Soekarno G.Sitoli	5.859.688.000
3.	726	JL. GOMO G. SITOLI	5.593.845.000
4.	1.140	JL. BARU HILINAA	723.056.000
5.	3.822	JL. PANCASILA NO. 12 G.SITOLI	29.291.061.000
6.	1.000	JL. DIPONEGORO T. DALAM	615.000.000
7.	1.250	LAHEWA	411.012.000
Jumlah			42.744.912.000

C.3.Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
: Rp
2.996.632.843

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.996.632.843 dan Rp. 2.955.732.843.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2022	2.955.732.843
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Transfer Masuk	40.900.000
Mutasi Kurang	
Penjualan	0
Saldo per 30 Juni 2023	2.996.632.843
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	(2.394.556.478)
Nilai Buku 30 Juni 2022	674.130.444

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.4.Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp 9.962.266.000

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.962.266.000 dan Rp. 9.962.266.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2022	9.962.266.000
Mutasi Tambah	
Selisih Revaluasi	0
Mutasi Kurang	
...	...
Saldo per 30 Juni 2023	9.962.266.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	(1.702.731.436)
Nilai Buku 30 Juni 2023	8.414.951.438

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.5.Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp 126.591.000

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 126.591.000 dan Rp. 126.591.000.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2022	126.591.000
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Penjualan	0
Saldo per 30 Juni 2022	126.591.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	(69.578.680)
Nilai Buku 30 Juni 2022	57.012.320

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.6.Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.380.440 dan Rp. 3.380.440.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2022	3.380.440
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Penjualan	0
Saldo per 30 Juni 2022	3.380.440
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	(0)
Nilai Buku 30 Juni 2022	3.380.440

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.7. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing Rp (4.174.801.362) dan Rp (4.169.838.862).

Rp (4.174.801.362]

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2023 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan

Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.996.632.843	2.513.709.403	482.923.440
2	Gedung dan Bangunan	9.962.266.000	1.858.148.310	8.104.117.690
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	126.591.000	75.523.216	51.067.784
4	Aset Tetap Lainnya	3.380.440	0	3.380.440
	Jumlah	13.088.870.283	4.447.380.929	8.641.489.354

Aset
Tetap:
Rp.
51.890.54
0.492

Aset Lainnya

C.9.Aset tak berwujud

Aset tak
Berwujud :
Rp
4.950.000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.950.000 dan Rp. 4.950.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun mutasi transaksi ATB per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2022	4.950.000
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Penjualan	0
Saldo per 30 Juni 2022	4.950.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	(4.950.000)
Nilai Buku 30 Juni 2022	0

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

C.10. Aset Lain-lain

Aset Lain-
lain :

Rp
12.500.000 Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 12.500.000 dan Rp. 12.500.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun mutasi transaksi ATB per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2022	12.500.000
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Penjualan	0
Saldo per 30 Juni 2022	12.500.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	(12.500.000)
Nilai Buku 30 Juni 2022	0

Aset lain-lain pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berupa Komputer yang sudah tidak digunakan lagi untuk menunjang operasional kantor.

C.11. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp (17.450.000) Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing Rp (17.450.000) dan Rp. (17.450.000) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Aset tak Berwujud	4.950.000	4.950.000
2	Aset Lain-lain	12.500.000	12.500.000
	Nilai perolehan Aset Lainnya	17.450.000	17.450.000
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(17.450.000)	(17.450.000)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.12. Kewajiban

Utang kepada Pihak Ketiga: Rp. 262.638.454

Utang kepada pihak ketiga per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 262.638.454 dan Rp 706.864. Utang kepada Pihak ketiga adalah kewajiban yang belum dibayarkan yang timbul akibat telah diterimanya hak atas barang.

C.13. Ekuitas

Cadangan Piutang: Rp 51,407,190,352

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 51,407,190,352 dan Rp 51,623,381,557. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2023 terdapat penurunan nilai Ekuitas sebesar Rp. (216.191.205) atau sebesar 0,42 persen dari nilai per 30 Juni 2022. Jumlah nilai Ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 51,407,190,352, sedangkan per 30 Juni TA 2022 tercatat sebesar Rp. 51,623,381,557.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNP: Rp 2.520.195

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 2.520.195 dan Rp 1.685.770 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Naik (turun) %
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.520.195	1.685.770	49,4
2.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
Total Pendapatan		2.520.195	1.685.770	49,4

D.2. Beban Pegawai

*Beban
Pegawai : Rp
2.167.133.372*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.167.133.372 dan Rp 2.035.765.711. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2023 dan 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Naik(turun)%
1.	Beban Gaji	869.675.519	820.887.420	5,94
2.	Beban Tunjangan-tunjangan	1.297.457.853	1.215.030.252	6,78
3.	Beban Honorarium dan Vakansi	0	0	0
4.	Beban Lembur	0	0	0
	Total	2.167.133.372	2.035.765.711	12,73

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
: Rp
22.234.500*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 22.234.500 dan Rp 24.303.500. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Naik (turun) %
1.	Beban Persediaan Konsumsi	22.234.500	24.303.500	-8,51
2.	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	0

3. Beban Persediaan Lainnya 0 0 0

Total	22.234.500	24.303.500	-8,51
-------	------------	------------	-------

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban
Barang dan
Jasa : Rp
395.815.835*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 395.815.835 dan Rp. 416.542.173. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2023 dan 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	363.923.440	334.888.700	8,67%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.739.200	8.745.721	-45,81%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	23.515.000	16.250.000	44,71%
Beban Barang Operasional Lainnya	2.334.000	20.246.500	-88,47%
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	0	150.000	-100,00%
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	512.425	0	0%
Beban Langganan Listrik	0	35.633.141	-98,56%
Beban Langganan Telepon	383.220	405.761	-5,56%
Beban Langganan Air	408.550	222.350	83,74%
Total Beban Barang dan Jasa	395.815.835	416.542.173	-4,98%

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp
357.575.996*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 357.575.996 dan Rp 353.490.940. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)

	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	218.480.000	140.419.000	55,59%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.064.000	132.657.000	-62,26%

Lainnya			
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89.031.996	80.414.940	10,72%
Total Beban Pemeliharaan	357.575.996	353.490.940	-6,67%

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp
83.606.050*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 83.606.050 dan Rp. 149.053.511. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2023 dan 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	83.606.050	149.053.511	-43,91%
Total Beban Perjalanan Dinas	83.606.050	149.053.511	-43,91%

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban
Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)%
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban
Bantuan*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30

Sosial : Rp 0 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0 Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)%
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp 238.822.608 Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 238.822.608 dan Rp. 531.402.592 Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	114.190.425	80.433.466	41,97%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	155.416.874	155.416.874	0,00%
Beban Penyusutan Irigasi	481.268	481.268	0,00%
Beban Penyusutan Jaringan	2.491.000	2.491.000	0,00%
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	272.579.567	238.822.608	41,97%

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp0 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing

sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional

Jumlah Beban Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan

: Rp
1.125.264

Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)%
Surplus(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	0	0	(0)
Surplus(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	(0)
Surplus(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos
Luar Biasa :
Rp 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)%
Pendapatan PNB	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas Awal pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 51.623.381.557 dan Rp. 51.807.928.031.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. (3.296.175.125) dan Rp. (3.215.352.459) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 .

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022

adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.807.404.353 dan Rp. 2.479.668.201.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(4.165.459)
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.316.406.916
Transfer Masuk	265.464.750
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0

Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	5.577.706.207

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2022, DDEL sebesar (Rp 4.165.459) sedangkan DKEL sebesar Rp. 5.316.406.916.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan transaksi atas pencatatan transfer Masuk/Keluar KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pada periode hingga 30 Juni 2023, Transfer Masuk sebesar Rp. 0, sedangkan Transfer Keluar Rp.0.

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 51.072.243.773 dan Rp 51.040.777.462.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tidak ada transaksi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Gunung Sitoli adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia A/C 653240986961000 a.n. BPG 007 Pengadilan Negeri Gunungsitoli 098696 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 29.982.375.
2. Bank Rakyat Indonesia A/C 654450991981000 a.n. BPG 007 Pengadilan Negeri Gunungsitoli 099198 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 17.980.500.
3. Bank Rakyat Indonesia A/C 0176.01.000420.30.6 a.n. RPL 007 PN GSITOLI UTK PDT BIAAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp.420.785.185.
4. Bank Rakyat Indonesia A/C 0176.01.001684.30.1 a.n. BPN 007 PN GUNUNGSITOLI yang digunakan sebagai Penampung PNBPN dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 1.032.000.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut : ada Revisi DIPA

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai Ralat SPM : Tidak terdapat Ralat SPM

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2023

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 30 Juni 2022	2023	Per 30 Juni 2023	Per 30 Juni 2023
A.	Peralatan dan Mesin		2.984.699.493	2.099.651.613	80.433.466	2.310.569.049	529.890.828
1.	Alat Bantu	7	238.722.000				
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	434.264.000				
3.	Alat Kantor	5	299.248.766				
4.	Alat Rumah Tangga	5	905.986.007				
5.	Alat Studio	5	101.032.820				
6.	Alat Komunikasi	5	59.829.100				
7.	Alat Kedokteran	5	56.300.000				
8.	Unit Alat Laboratorium	8	9.525.000				
9.	Komputer Unit	4	674.968.310				
10.	Peralatan Komputer	4	204.823.490				
B.	Gedung dan Bangunan		9.962.266.000	1.236.480.814	155.416.874	1.547.314.562	8.414.951.438
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	7.087.118.000				

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	2. Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2.875.148.000				
C.	Irigasi		26.951.000	3.850.144	481.268	4.812.680	4.331.412
	1. Bangunan Air Bersih/air Baku	40	26.951.000				
D.	Jaringan		99.640.000	59.784.000	2.491.000	64.766.000	62.275.000
	1. Jaringan Telepon	20	99.640.000				
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
	1. Alat Angkutan Darat Bermotor	7					
	2. Alat Kantor	5					
	3. Alat Rumah Tangga	5					
	4. Komputer Unit	4					
	5. Peralatan Komputer	4	12.500.000			12.500.000	0
	6. Bangunan Gedung Tempat Kerja	50					
	Jumlah		13.073.556.493	3.399.766.571	238.822.608	3.927.462.291	9.011.448.678

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2023

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
		U				Nilai	Keterangan
	NIHIL						
			Jumlah :				

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (098696) PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

Tgl Data : 31/07/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 02/08/23 11:51 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	30,000,000	0	30,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	212,885	0	212,885	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	212,885	0	212,885	0.00
Persediaan	635,000	1,045,000	(410,000)	(39.23)
JUMLAH ASET LANCAR	30,847,885	1,045,000	29,802,885	2,851.95
ASET TETAP				
Tanah	42,744,912,000	42,744,912,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,996,632,843	2,955,732,843	40,900,000	1.38
Gedung dan Bangunan	9,962,266,000	9,962,266,000	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	126,591,000	126,591,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	3,380,440	3,380,440	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,447,380,929)	(4,169,838,862)	(277,542,067)	6.66
JUMLAH ASET TETAP	51,386,401,354	51,623,043,421	(236,642,067)	(0.46)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,950,000	4,950,000	0	0.00
Aset Lain-lain	12,500,000	12,500,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(17,450,000)	(17,450,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	51,417,249,239	51,624,088,421	(206,839,182)	(0.40)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	252,638,454	706,864	251,931,590	35,640.74
Uang Muka dari KPPN	30,000,000	0	30,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	282,638,454	706,864	281,931,590	39,884.84
JUMLAH KEWAJIBAN	282,638,454	706,864	281,931,590	39,884.84
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	51,134,610,785	51,623,381,557	(488,770,772)	(0.95)
JUMLAH EKUITAS	51,134,610,785	51,623,381,557	(488,770,772)	(0.95)
JUMLAH EKUITAS	51,134,610,785	51,623,381,557	(488,770,772)	(0.95)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	51,417,249,239	51,624,088,421	(206,839,182)	(0.40)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (098696) PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

Tgl Data : 31/07/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 02/08/23 11:51 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Gunungsitoli, 2 Agustus 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

ERWIN HAREFA, S.H.
197212211993031002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI 098696

Tgl Data : 31/07/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 02/08/23 11:53 AM
Halaman : 2
lap_ira_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	5,491,491,000	2,775,224,163	2,716,266,837	51	5,299,363,000	2,482,051,300	2,817,311,700	87
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Gunungsitoli, 2 Agustus 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

ERWIN HAREFA, S.H.
197212211993031002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2023
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (098696) PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

Tgl Data : 31/07/23 7:26 PM
 Tgl Cetak : 02/08/23 11:54 AM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,770,195	1,685,770	1,084,425	64.328
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,770,195	1,685,770	1,084,425	64.328
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,770,195	1,685,770	1,084,425	64.328
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,167,133,372	2,035,765,711	131,367,661	6.453
Beban Persediaan	22,234,500	24,303,500	(2,069,000)	(8.513)
Beban Barang dan Jasa	395,815,835	416,542,173	(20,726,338)	(4.976)
Beban Pemeliharaan	357,575,996	353,490,940	4,085,056	1.156
Beban Perjalanan Dinas	83,606,050	149,053,511	(65,447,461)	(43.909)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (098696) PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

Tgl Data : 31/07/23 7:26 PM

Tgl Cetak : 02/08/23 11:54 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	272,579,567	238,822,608	33,756,959	14.135
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,298,945,320	3,217,978,443	80,966,877	2.516
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,296,175,125)	(3,216,292,673)	(79,882,452)	2.484
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	940,214	(940,214)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	940,214	(940,214)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	940,214	(940,214)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,296,175,125)	(3,215,352,459)	(80,822,666)	2.514
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,296,175,125)	(3,215,352,459)	(80,822,666)	2.514

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Gunungsitoli, 2 Agustus 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

ERWIN HAREFA, S.H.

197212211993031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (098696) PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

Tgl Data : 31/07/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 02/08/23 11:54 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	51,623,381,557	51,807,928,031	(184,546,474)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,296,175,125)	(3,215,352,459)	(80,822,666)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,807,404,353	2,479,668,201	327,736,152	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(488,770,772)	(735,684,258)	246,913,486	-
EKUITAS AKHIR	51,134,610,785	51,072,243,773	62,367,012	-

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Gunungsitoli, 2 Agustus 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

ERWIN HAREFA, S.H.

197212211993031002